

Tugas 3

Nama: Aghisna Amalia Putri

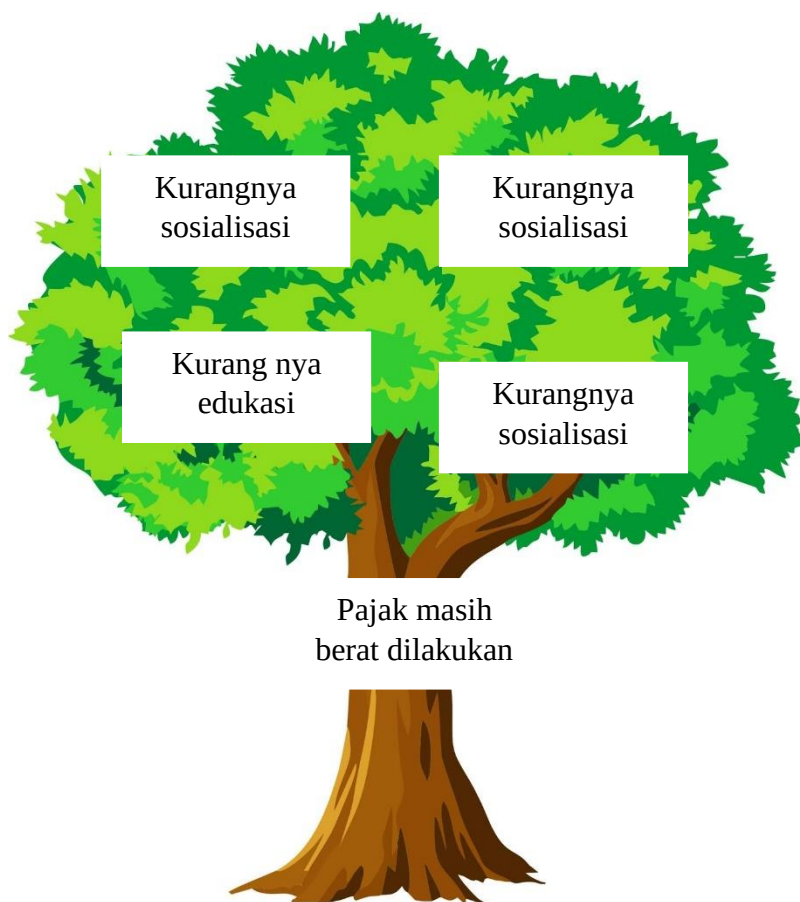
NPM: 2226061020

1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Disebutkan dalam [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2019](#) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 1 dijelaskan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Pelaku usahanya pun bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara mendetail, untuk pelaku usaha PMSE dalam negeri dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Sedangkan untuk pelaku usaha PMSE luar negeri harus memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia. Kriteria tersebut meliputi jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses. Pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat melakukan usaha secara langsung atau melalui sarana pihak penyelenggara PMSE atau yang disebut dengan PPMSE. Hal ini semakin meningkatkan pentingnya sektor ini bagi perekonomian. Namun, ada tantangan dengan pemungutan pajak yang mungkin berbahaya. kesulitan pelacakan transaksi yang dilakukan dalam sistem e-commerce, khususnya, (1) stabilitas perekonomian nasional. Sebagian besar transaksi terjadi secara virtual, tanpa interaksi tatap muka antara pembeli dan penjual. Ketidakmampuan untuk memantau dan mengaudit transaksi dengan mudah membuat pengumpulan pajak atas transaksi e-commerce menjadi menantang. manual online, (2) ketidaktahuan dan ketidakpatuhan pelaku e-commerce terhadap peraturan perpajakan. Banyak peserta e-commerce tidak menyadari bahwa mereka harus membayar pajak atas transaksi, atau mereka bahkan mencoba menggunakan cara yang melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak.

Akan ada efek yang merugikan bagi perekonomian nasional jika masalah pemungutan pajak atas perdagangan e-commerce tidak diselesaikan. Pemerintah tidak akan dapat memungut pajak dari penjualan online, yang akan memotong sumber pendapatan negara. Selain itu, pelaku korporasi tradisional terkadang melakukan ketidakadilan. Mereka yang membayar pajak tepat waktu akan mengalami kerugian.

Agar efektif memungut pajak atas transaksi online, pemerintah juga harus meningkatkan tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku e-commerce.



2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:

Di Indonesia kecenderungan anak muda untuk menggunakan media digital semakin meningkat, namun kecenderungan tersebut tidak diimbangi dengan

kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna atau bentuk kesepakatan yang telah terjamin. Setiap kali Anda mendaftar untuk platform atau aplikasi media, Anda perlu diberi tahu bahwa mereka harus mengikatkan diri melalui kontrak elektronik umum. Perusahaan media atau pihak terkait lainnya dapat melakukan edukasi ini. Regulasi pemerintah atas aktivitas komersial yang berbahaya bagi pengguna media digital juga diperlukan, seperti kontrol yang ketat terhadap jenis konten yang dapat diakses oleh anak-anak dan remaja di platform tersebut. Memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

Pemberian THR ini merupakan penghargaan pemerintah terhadap kontribusi aparatur pemerintah dengan harapan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi, sesuai yang telah disampaikan pemberian THR ini sekaligus upaya pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui THR kepada aparatur negara yang nantinya pasti juga akan dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan yang relevan dalam upaya menambah perputaran uang di masyarakat sehingga para THR untuk aparatur negara menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat pondasi pemulihan ekonomi

Analisis dan saran terperinci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan:

1. Pemerintah mengkaji program tunjangan hari raya keagamaan bagi karyawan/buruh di dunia usaha tahun 2023.
2. Untuk menjamin keadilan, sanksi hukum harus ditegakkan terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
3. Aturan yang lebih rinci untuk pembayaran hari raya keagamaan tahunan 2023 bagi karyawan dan buruh di perusahaan.

Agar dapat melayani perusahaan dan karyawan dengan sebaik-baiknya, diharapkan kebijakan THR dapat diterapkan dengan lebih berhasil dan efisien.